

PERAN ORGANISASI KEAGAMAAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PEREMPUAN BERBASIS MODAL SOSIAL

*Khumaidi**

Abstract : *This writing is to show how women religion organization has an interrelationship use social capital by giving economical benefit to green vendors in local term called "Mlijo" in Malang. Social capital which performs social informal relationship, also contribute to the proses of how the community group help others aspecially women green vendors as community group which have role in rising fund to empower their efforts.*

Kata Kunci: Modal Sosial, Orgam, Ekonomi, Perempuan

PENDAHULUAN

Kehidupan sosial yang terdiri dari individu, keluarga dan masyarakat tidak terlepas dari pranata dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Aturan-aturan dalam bentuk pranata dan norma senantiasa mengarahkan individu-individu maupun masyarakat membentuk suatu komitmen tertentu yang memunculkan perilaku kelompok secara bersama dan simultan. Perilaku tersebut berupa kegiatan bersama antar warga masyarakat seperti adanya kerjasama dan gotong royong, sambatan, dan kegiatan berkaitan dengan adat serta tradisi masyarakat lainnya. Hubungan-hubungan sosial informal yang telah terjalin tersebut merupakan modal sosial yang dapat diperankan pada persoalan-persoalan pembangunan ekonomi yang sifatnya lokal (Tonkiss, 2000) termasuk dalam hal pengentasan kemiskinan, karena hal-hal ini akan lebih mudah untuk dicapai dan biayanya kecil jika terdapat modal sosial yang besar (lihat: Narayan dan Pritchett 1997, Grooaert dan Van Bastelaer 2001).

Kelompok-kelompok yang terbentuk dan terbina dengan sendirinya terjadi karena adanya komitmen dan kesepakatan bersama dalam masyarakat yang merupakan wadah berkumpulnya masyarakat dinamakan kelembagaan sosial (Norman UpHoff, 1984). Kelembagaan-kelembagaan sosial ini selanjutnya membentuk kelompok masyarakat, sebagai usaha individu-individu dalam kelompok tersebut meningkatkan taraf hidup keluarga dan masyarakat, serta bagaimana modal sosial memberi manfaat ekonomis bagi pelaku usaha mereka dalam kelompok masyarakat. Modal sosial dalam pengertian jaringan-jaringan atau hubungan-hubungan sosial informal turut menentukan proses mengatasi kebutuhan dana usaha. Pengalaman teman ataupun kerabat dekat yang telah menjadi anggota kelompok mlijo (pedagang sayur keliling), misalnya merupakan faktor penting sebagai alasan tanggung renteng yang dapat saling menjadi jaminan mengakses modal.

Tonkiss (2000) mengingatkan bahwa modal sosial barulah bernilai ekonomis kalau dapat membantu individu atau kelompok. Kelompok masyarakat (Pokmas) termasuk di dalamnya pokmas perempuan dalam lingkungan masyarakat ternyata telah teruji mampu menangkai berbagai gejolak ekonomi yang

*. Staf Pengajar pada Balai Diklat Depdagri PMD Malang, Lulusan S2 Magister Administrasi Pemerintahan Unibraw Malang.

terjadi di Negara Indonesia ini, melalui berbagai usaha mikro kecil yang dikelola secara individu maupun berkelompok ternyata tetap bertahan saat terjadi krisis ekonomi global yang juga berimbas melanda Indonesia tahun 1997 dan berulang kembali pada saat keuangan makro Amerika Serikat mengalami krisis di tahun 2007.

Kaum perempuan yang telah mendapat *label* termarginalisasi disebabkan karena:

1. Perbedaan peran perempuan dan laki-laki. Perempuan bekerja di sektor domestik (Rumah Tangga) sedangkan pria di sektor publik.
2. Beban kerja perempuan terlalu panjang dibanding laki-laki.
3. Tingkat partisipasi dalam pembangunan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.
4. Tingkat peluang memperoleh pelatihan/kursus perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.

Dibalik itu semua, ternyata menjadikan sebagian perempuan menjadi lebih ulet, tekun dan istiqomah dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan yang menopang kehidupan rumah tangganya, dengan memanfaatkan modal sosial yang ada misalnya untuk mengakses sumber-sumber keuangan, mendapatkan informasi, menemukan pekerjaan, merintis usaha dan meminimalkan biaya transaksi.

Tidak dapat dipungkiri terbentuknya kelompok keuangan mikro yang *notabene* didirikan oleh kelompok perempuan seperti kelompok arisan RT, pasar, pengajian dan lain sebagainya merupakan modal sosial yang telah dikembangkan oleh Pokmas perempuan dimana mereka berada. Dalam hal kredit misalnya, Bastelaers (2000) telah mengingatkan bahwa anggota masyarakat yang paling miskin seringkali masih tidak memiliki akses terhadap fasilitas mikro-kredit, sekalipun program-program kredit formal maupun informal yang ditujukan untuk kaum miskin sudah menempatkan jaringan-jaringan sosial sebagai elemen penting.

Pokmas Perempuan dengan keterbatasan dan ketidakberdayaan mereka berpotensi untuk berkembang manakala pengetahuan dan pengalaman kaum perempuan dihadirkan sebagai jalan untuk menghargai kemandirian perempuan melalui pokmas masing-masing. Sebaliknya kelemahan tersebut juga berpotensi kaum perempuan menyerah terhadap kondisi kehidupan dan semakin jauh dari harapan sebagai suatu Pokmas perempuan yang mandiri. Di sisi lain, Pokmas perempuan menjadi penting dalam menopang pendapatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat dengan memberi jalan mengakses modal dalam peningkatan usaha mereka agar lebih mandiri dan memiliki keberdayaan dalam meningkatkan usahanya.

Tulisan ini mencoba menunjukkan bagaimana modal sosial yang merupakan jaringan sosial dalam kelompok masyarakat memberikan manfaat ekonomis pada kelompok penjual mlijo (*green vendor*) di Kelurahan Cemorokandang – Malang. Penjual mlijo adalah istilah lokal Malang sebagai sebutan pada pedagang yang menjajakan dagangannya berupa sayur-mayur dari rumah ke rumah atau dari kampung satu ke kampung lainnya.

PEMBAHASAN

A. Kondisi Perempuan Indonesia

Indeks pembangunan manusia skala internasional dan nasional dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kondisi dan posisi perempuan meliputi 3 (tiga) aspek tersebut di atas sebagai berikut:

1. Pendidikan

Di bidang pendidikan, kaum perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Kondisi ini antara lain disebabkan adanya pandangan dalam masyarakat yang mengutamakan dan mendahulukan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan daripada perempuan. Berdasarkan global Monitoring Report (2006), terdapat 771 juta orang buta aksara di seluruh dunia. Sebanyak 72,7 persennya adalah perempuan.

Berdasarkan hasil Survey Penduduk 2005 (BPS) diketahui jumlah penduduk Indonesia sebesar 218.868.791 orang. Jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan, (50,1 % diantaranya laki-laki dan 49,9 % perempuan). Penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang masih buta aksara pada akhir Agustus 2008 sebanyak 10,16 juta atau (6,62 persen). Dari jumlah itu sebanyak 65 persen atau 6,6 juta di antaranya adalah perempuan. Sebenarnya program pemberantasan buta aksara berhasil menekan jumlah penduduk buta aksara dari tahun ke tahun. Dengan perbandingan tahun 2004 angka buta aksara usia 15 tahun ke atas sebanyak 15,4 juta orang (10,21 persen), dan pada akhir Agustus 2008 turun menjadi 10,16 juta atau (6,62 persen). Dari jumlah tersebut sebanyak 65 persen dari jumlah penduduk buta aksara yang masih tersiksa adalah perempuan (Sumber: BPS, 2008).

2. Kesehatan

Di bidang kesehatan dan status gizi perempuan masih merupakan masalah utama, yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kematian ibu (AKI) walau tahun 2004 angka kematian bayi sekitar 30,8 persen per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu sekitar 270 dari per 100 ribu kelahiran, terdapat penurunan tahun 2007 angka kematian bayi mencapai 26,9 persen per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu berkisar 248 per 100 ribu kelahiran. (Sumber BPS, 2008).

3. Ekonomi

Di bidang ekonomi, secara umum partisipasi perempuan masih rendah, kemampuan perempuan memperoleh peluang kerja dan berusaha masih rendah, demikian juga dengan akses terhadap sumber daya ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) posisi Februari 2007 66,60 persen dari jumlah angkatan kerja mencapai 108,13 juta orang, bertambah 1,74 juta orang dibanding jumlah angkatan kerja Agustus 2006 sebesar 106,39 juta orang atau bertambah 1,85 juta orang dibanding Februari 2006 berada sedikit dibawah TPAK Februari 2006 sebesar 66,74 persen sebesar 106,28 juta orang dan bertambah 2,33 juta orang dibanding Februari 2005 sebanyak 105,80 juta orang, yang didominasi kaum laki - laki (BPS, 2008).

Oleh sebab itu pemecahan masalahnya tidak dapat menggunakan program pengentasan kemiskinan yang bersifat umum, sehingga kepada mereka perlu dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri unik tertentu untuk kemudian mendorong mereka melakukan aktivitas ekonomi produktif melalui proyek-proyek pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan yang bersifat khusus (Rondinelli: 1990:95).

B. Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat

Kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat di tingkat lokal akan sangat berarti apabila hal ini dimulai dengan peninjauan kebutuhan sehingga kelompok-kelompok tersebut benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat dan sinergi dengan program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Esman dan Uphoff (1984) menyatakan bahwa pada dasarnya ada elemen penting dalam masyarakat lokal, yaitu pemerintah lokal, organisasi politik lokal, dan organisasi lokal. Terminologi ini menyerupai pendapat Linz dan Stepan (1996) yang menyatakan bahwa dalam masyarakat terdapat elemen: state, political society, civil society, economic society dan rule of law.

Pemberdayaan adalah sebuah proses yang membuat orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parros, 1994). Sejalan dengan makna tersebut, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan bertanggungjawab adalah bagian pokok dari upaya

pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Dengan demikian pemberdayaan bertujuan meningkatkan kekuasaan kelompok-kelompok yang lemah atau tidak beruntung (Jim Ife, 1995). Yang paling penting di sini adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Sementara itu pemberdayaan merupakan istilah yang sering dipakai untuk menggantikan istilah pembangunan masyarakat yang dirasa mengalami distorsi pemaknaan karena dalam praktiknya proses pembangunan yang selama ini dilaksanakan tidak semuanya dapat memberikan daya (kekuatan) bagi masyarakat untuk lebih berkembang. Bahkan sebaliknya banyak kelompok masyarakat yang menjadi tergantung dan semakin tidak berdaya. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila dalam program-program kebijakan sosial ini cenderung menggunakan *charity strategy*, pendekatan *patronizing*, asuh (*nurture*) dan proteksi (Tjokrowinoto, 1996:217).

Dengan kata lain pemberdayaan menunjukkan pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. (Swift dan Levin, 1987). Dimana Pemberdayaan adalah suatu cara mengarahkan rakyat, organisasi dan komunitas agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984). Lebih lanjut menurut Bookman dan Morgen, pemberdayaan mengacu pada usaha untuk menumbuhkan keinginan pada seseorang untuk mengaktualisasikan diri, melakukan mobilitas ke atas, serta memberikan pengalaman psikologis yang membuat seseorang merasa berdaya (Raharjo dan Rinakit, 1996).

Dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat terdapat 4 (empat) kategori kebijakan yang diselenggarakan secara terpadu, yakni:

1. kebijakan perluasan kesempatan (*promoting opportunity*) berkaitan dengan penciptaan iklim dan lingkungan yang kondusif dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
2. Kebijakan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) berkaitan dengan upaya penguatan masyarakat beserta organisasi dan kelembagaannya untuk mampu mengakses dan terlibat dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan publik;
3. Kebijakan peningkatan kemampuan (*capacity building*) berkaitan dalam upaya peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, permodalan, prasarana, teknologi, serta informasi pasar; dan
4. Kebijakan perlindungan sosial (*social protection*) berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat miskin, utamanya kelompok masyarakat yang paling miskin yang disebabkan bencana alam, dampak negative krisis ekonomi dan konflik sosial yang diarahkan melalui kemampuan kelompok masyarakat dalam menyisihkan sebagian dari penghasilan melalui mekanisme tabungan kelompok.

Sesuai dengan permasalahan masyarakat kebijakan yang paling tepat mestinya yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran dengan memberikan modal usaha dengan berbagai pertimbangan dan disesuaikan dengan sumber daya yang ada. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila pendekatan yang digunakan dalam kebijakan ini disebut dengan: hitung, biayai dan salurkan (*count, cost and deliver*) (Sjahrir, 1986:49). Sehingga hal ini sesuai dengan salah satu ciri lain kemiskinan pedesaan yang sudah lama dikenali para ahli sejak J.H. Boeke adalah kehausan masyarakat desa terhadap kredit/pinjaman. Pinjaman ini diperlukan biasanya karena penghasilan keluarga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

C. Kelompok Dan Organisasi Sebagai Institusi Masyarakat

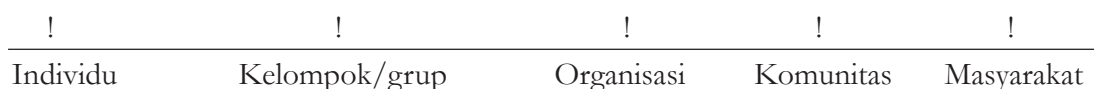
Dalam usaha meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat perlu digali cara-cara pengelolaan usaha yang paling sesuai. Misalnya, melalui apa yang disebut "*conscience collective*" akan dapat menahan kekuatan arus individualism yang menyertai modernisasi, dan semangat kegotong-royongan

dapat diberi fungsi-fungsi baru sehingga dapat meningkatkan taraf hidup anggota kelompok. Peran penting modal sosial dalam kemajuan-kemajuan masyarakat dapat diketahui dari esensi modal sosial yang menunjukkan “*Trust*” dan norma-norma kooperasi sipil yang esensial agar masyarakat berfungsi dengan baik dan juga penting bagi kemajuan ekonomi dari masyarakat yang bersangkutan (de Mello dalam Brata, 2001). Tanpa ada modal sosial yang baik, maka tindakan-tindakan yang muncul cenderung non-kooperatif dan hasilnya akan *inferior*. Sebaliknya modal sosial yang tinggi secara potensial membawa masyarakat pada *outcomes* yang lebih baik dengan adanya fasilitasi kerjasama yang lebih besar (Narayan dan Pritchett dalam Barata, 2001). Dengan demikian modal sosial berperan mengembangkan kualitas manusia yang memang menjadi tujuan pembangunan dan kualitas tersebut yang dimengerti sebagai manusia yang mandiri dan bermanfaat, manusia yang produktif, efisien, dan bermoral.

Berkaitan dengan memprioritaskan pembangunan bagi kaum perempuan sebelumnya telah dikembangkan berbagai program pemberdayaan perempuan, dan mulai diperkenalkan tema *Women In Development* (WID), yang bermaksud mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan. Setelah itu, beberapa kali terjadi pertemuan internasional yang memperhatikan tentang pemberdayaan perempuan. Sampai akhir sekitar tahun 1980-an, berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas kesetaraan lebih penting daripada sekedar kuantitas, maka tema WID diubah menjadi *Women and Development* (WAD). Ini menjadi tidak mudah manakala keadilan dan kesetaraan gender hanya bisa berlaku pada masyarakat yang secara umum sudah mengarah pada kehidupan yang standar. Hal ini untuk di Indonesia di mana secara sosiologis dan budaya menganggap bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat sehingga harus diterima (*nature*) bukan hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran yang berbeda (*nurture*).

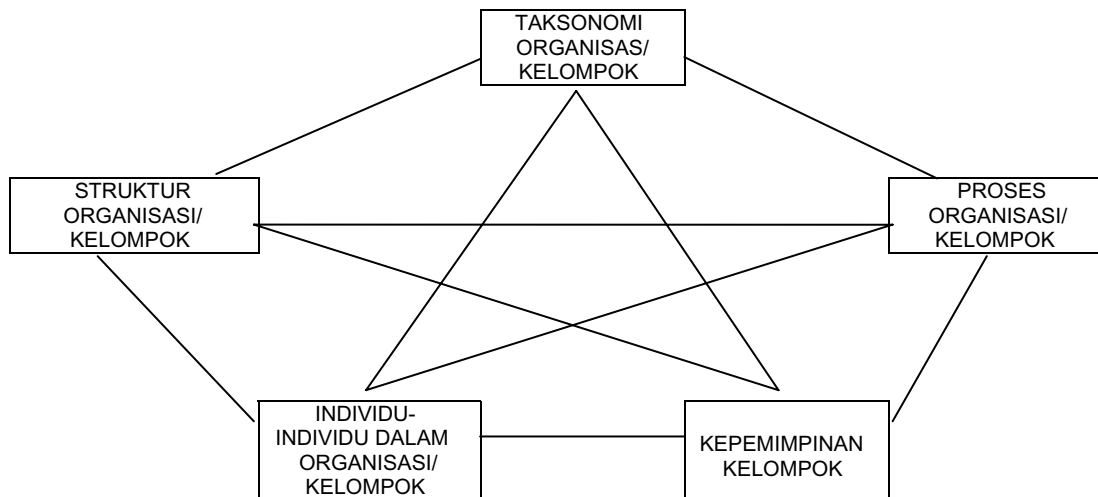
Pokmas Perempuan dalam satu sisi, di masyarakat Indonesia wajar ada sebagai wadah kaum perempuan untuk menunjukkan perannya di lingkungan mereka. Sebagaimana Brown dan Moberg (Ruwiyanto, 1988) mengungkapkan bahwa organisasi berada dalam kontinum individu-masyarakat. Mereka berdua menyebutkan bahwa masyarakat itu merupakan gabungan dari komunitas. Komunitas merupakan gabungan dari kelompok, dan kelompok merupakan gabungan dari individu. Gambar 1 menunjukkan kontinum tersebut.

Bagan
Kontinum Individu – Masyarakat



Sebagai suatu sistem, organisasi terdiri dari setidaknya-tidaknya empat sub-sistem, yaitu Taksonomi organisasi, struktur organisasi. Proses organisasi dan individu-individu dalam organisasi serta kepemimpinan yang dikembangkan. Apabila organisasi tertentu telah mempunyai sifat sebagai organisasi formal, maka sub sistem atau kelima sub sistem tersebut saling mempengaruhi dalam gerakannya untuk mencapai tujuannya.

Bagan
Organisasi/ Kelompok Sebagai Suatu Sistem



Adapun kelompok sebagai sub sistem yang lebih kecil dari organisasi, iapun juga sebagai suatu system tertentu. Kelompok juga terdiri dari individu-individu yang didalamnya kait-mengait dengan struktur kelompok itu, system taksonomi kelompok dan proses yang terjadi dalam kelompok, serta kepemimpinan yang dikembangkan didalamnya.

D. Membangun Institusi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Perempuan Dalam Pengembangan Sektor Ekonomi

Perlakuan masyarakat terhadap perempuan sangat bervariasi terjadi di Indonesia. Hal ini ada disebabkan beberapa faktor, antara lain: karena pengetahuan masyarakat lokal atau kearifan lokal masyarakat (*sosial lokal wisdom*), budaya dan adat istiadat lokal. Nampak beberapa contoh pada masyarakat Bugis utamanya yang tersebar di daerah tengah dan utara Provinsi Sulawesi Selatan bagi kaum laki-laki sangat lazim pergi berbelanja di Pasar sebaliknya di Pulau Jawa kurang lazim manakala sebagian besar kaum laki-laki berbelanja sayuran di pasar tradisional, bagi kaum perempuan Bugis pada umumnya sangat lazim untuk melakukan kegiatan perdagangan sedangkan kaum laki-laki menggarap sawah atau kebun bahkan menanam padi sebaliknya di Pulau Jawa yang paling lazim adalah para kaum lelaki petani mengolah sawah dan kaum perempuan menanam padi.

Di wilayah perkotaan di Jawa banyak kaum perempuan bekerja sebagai buruh "*linting*" rokok terutama di kabupaten Kediri, Malang, Kudus dan kawasan Industri rokok lainnya. Maka kerumunan-kerumunan masyarakat yang memiliki kegiatan sejenis ini biasanya akan membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki *interest* atau kepentingan tertentu.

Kelompok-kelompok perempuan yang terbentuk dengan sendirinya tanpa ada rekayasa atau intervensi dari pihak luar dan murni untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri disebut sebagai Institusi atau kelembagaan masyarakat yang didasarkan pada komitmen bersama berupa kesepakatan yang terikat dengan norma atau nilai sosial yang dipahami masyarakat bersangkutan. Namun demikian adapula kelompok masyarakat lainnya yang terbentuk berdasarkan adanya kepentingan program-program pembangunan. Usaha pengelompokan tersebut juga dimaksudkan untuk memudahkan memilih kelompok yang mana dapat dipergunakan sebagai media apa bagi program-program pembangunan masyarakat, kelompok ini biasa disebut institute atau lembaga/organisasi (Koentjoroningrat, 1986). Lebih jauh pembentukan kelompok ini sangat penting dalam proses pelibatan masyarakat, melalui kelompok akan dibina solidaritas, kerjasama, musyawarah, rasa aman dan percaya kepada diri sendiri. Hal-hal tersebut dapat pula merujuk kepada ajaran agama. Salah satu cara yang efektif untuk membentuk kelompok

adalah melalui pendekatan agama atau kepentingan yang sama secara primordial. Dalam kelompok primordial itu para anggota kelompok akan peroleh referensi yang sama.

Dengan bertolak dari kelompok primordial, maka para anggota akan merasakan adanya hal-hal baru, melalui kelompok para anggota akan menyusun program. Dengan kerangka sistematis mereka akan bisa merasakan adanya perkembangan dan kemajuan sebagai suatu hasil kegiatan mereka. Di sinilah peran motivator luar dibutuhkan untuk melakukan persiapan sosial yang mampu men garahkan segenap anggota kelompok sasaran untuk mulai bersedia melakukan kegiatan mempersiapkan diri dengan mengidentifikasi kebutuhan dan mencari solusinya (Karsidi, 1997). Terbukti dari kedua bentuk kelompok masyarakat yaitu pertama, terbentuk secara alamiah sesuai kebutuhan masyarakat tertentu lebih eksis keberadaannya. Sedangkan Kelompok masyarakat yang terbentuk karena kepentingan program-program pembangunan umumnya selesai kegiatan maka eksistensi kelompok akan hilang dengan sendirinya.

Krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun 1997 dan sepuluh tahun berikutnya krisis global melanda Amerika Serikat tahun 2007, menjadikan Indonesia mengalami kehancuran ekonomi yang hingga kini masih terasa dampaknya. Ditambah lagi adanya bencana alam: gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran hutan dan korupsi disegala bidang pada tahap yang menguatirkan lebih memperparah keadaan perekonomian rakyat, yang memang sebagian besar memiliki pendapatan yang kurang memadai. Menurut Sharp, et al (1996) dalam Kuncoro (2004), penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi adalah: *Pertama*, secara makro kemiskinan muncul adanya ketidakseimbangan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. *Kedua*, Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia.

Di sisi lain, persoalan memperoleh penghasilan merupakan persoalan yang banyak dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti diungkapkan Busse (2001), dalam hidup keseharian, modal sosial atau hubungan antar individual merupakan salah satu sumber daya atau modal yang digunakan orang dalam strategi pemecahan persoalan kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, sektor informal menjadi sangat penting untuk mengembangkan usaha sampingan akibat dari krisis yang banyak melanda sektor-sektor modern membawa akibat pada berkurangnya tenaga kerja yang diserap atau dengan kata lain terjadi peningkatan pengangguran serta telah membalikkan tren formalisasi ekonomi (Suryahadi dkk, 2003). Menurut Raharjo (1989) mendasarkan pada kelompok kepentingan ekonomi, ada tiga tahap kemajuan kelompok. Tahap pertama dapat disebut sebagai kelompok swakarsa, kemudian kelompok swakarya dan terakhir adalah kelompok mandiri. Dalam prinsip partisipasi menurut Raharjo (1989) terdapat unsure penting yaitu: kesadaran, kemampuan dan kesempatan.

Berkaitan dengan kehidupan beragama, mayoritas di Indonesia masyarakatnya beragama Islam. Dalam dinamika kehidupan masyarakat islam banyak tumbuh dan berkembang Pokmas keagamaan seperti Kelompok Tahlil, Yasin dan Istighosah, Ketakmiran Masjid, majelis Pengajian dan lain sebagainya. Peran Kelompok Keagamaan dalam pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi menjadi sangat penting dalam mewadahi kebutuhan salah satu sisi kehidupan amal usaha Pokmas keagamaan dalam mengembangkan sector ekonomi. Salah satu Pokmas keagamaan tersebut berupaya untuk melakukan pemberdayaan Pokmas Penjual sayur Keliling atau dalam bahasa jawa sebut “Penjual Mlijo”.

E. Peran Organisasi Keagamaan Memberdayakan Pokmas Perempuan: Kasus Penjual Mlijo

Pokmas perempuan utamanya yang termasuk dalam usaha kecil dan mikro yang telah mencapai lebih dari 40 juta unit usaha apabila memperoleh dukungan yang bersifat nyata, maka kemampuan mereka dalam menyerap tenaga kerja tentu tidak diragukan lagi. Dengan ratio, apabila 10 % dari setiap angkatan kerja mau dan mampu menjadi wirausaha dan apabila usaha itu berkembang, misalnya mampu menyerap 2 orang saja maka masalah pengangguran cepat teratasi (Abdullah, 2004). Jaringan social yang ada barulah bermanfaat dalam memperoleh bantuan atau pinjaman yang bersifat informal. Hal ini sangat beralasan karena regiditas prosedur administrasi dari program bantuan pemerintah menyebabkan

bantuan tersebut sulit diakses oleh lapisan miskin. Untuk menindaklanjuti upaya tersebut, maka upaya pemberdayaan Pokmas perempuan “Mlijo” merupakan salah satu alternative yang dilakukan kelompok pengajian perempuan dalam member kontribusi dalam mendukung pengembangan usaha kecil dan mikro. Kuncoro (2000a) juga menyebutkan bahwa usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telah memainkan peranan penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga.

1. Pengertian

Mlijo adalah istilah lokal daerah Malang dan sekitarnya serta Jawa Timur pada umumnya bagi penjual sayur mayur segar baik dengan memikul, menyunggi, menggendong, menenteng, mengangkut dengan mendorong gerobak, bersepeda dan bersepeda motor, dan bahkan dengan menggunakan mobil terbuka yang berkeliling mendatangi konsumen terutama ibu-ibu rumah tangga di kampung-kampung, komplek perumahan maupun gang-gang pemukiman penduduk.

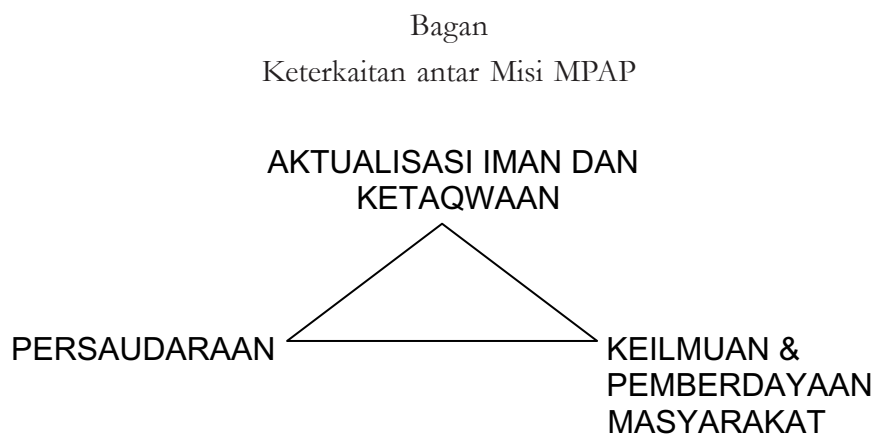
Mlijo tersebut terdiri dari mlijo yang “mandiri”, “semi mandiri” dan “non-mandiri”. Mlijo mandiri jika mereka memiliki kendaraan, dagangan sendiri dan juga menerima sayuran, minuman dan makanan titipan. Mlijo semi mandiri adalah jika mereka memiliki kendaraan tetapi hanya menjualkan dagangan orang lain. Mlijo non mandiri apabila mereka menggunakan kendaraan dan menjualkan dagangan orang lain yang mempekerjakannya.

Alasan mereka ikut dalam kelompok penerima bantuan kredit informal dari Pokmas perempuan keagamaan tersebut adalah untuk menambah penghasilan keluarga. Upaya menambah penghasilan ini menjadi penting karena secara actual krisis ekonomi telah mengikis daya beli mereka. Jaringan kekerabatan ataupun teman telah memberikan manfaat bagi mereka untuk memperoleh peluang usaha.

Pengembangan pengguliran dana tidak hanya didominasi oleh kelompok yang pernah memperoleh dana saja, namun dapat diberikan kepada anggota baru yang ingin mengembangkan usahanya.

2. Majelis Pengajian Ahad Pagi : Gambaran Organisasi Keagamaan Berbasis Perempuan

Majelis Pengajian Ahad Pagi atau biasa disebut dengan MPAP, merupakan sebuah forum silaturahmi kaum perempuan muslim, pertama kali didirikan pada tanggal 24 Maret 2000, di Kelurahan Cemorokandang - Kota Malang-Jawa Timur. Pokmas ini didirikan dengan maksud sebagai wahana silaturahmi antar ibu-ibu warga muslim. Visi yang dikembangkan adalah “Membangun persaudaraan, menjernihkan hati dan pengembangan pikir”. Sedangkan misi yang dikembangkan adalah: “Peningkatan ketahanan dan kesadaran ukhuwah, Aktualisasi Diri dan Keimanan secara terus menerus serta pengembangan ilmu pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat.



3. Apa Strateginya?

Strategi pemberdayaan Sumodiningrat (1995) dalam Sulistyani (2004) mempunyai dua arah: *Pertama*, tetap memberi peluang pada sektor tradisional dan masyarakat modern dapat tetap maju dan, *Kedua*, keberpihakan kepada masyarakat yang kurang berdaya mendapatkan perhatian utama.

Untuk mencapai visi dan misi Majelis Pengajian Ahad Pagi, (MPAP) dikembangkan strategi antara lain: Mengaktualisasi Iman dan Ketaqwaan melalui Majelis Pengajian, Mengembangkan program jaringan kemitraan antar anggota, simpatisan dan masyarakat muslim dan Mengembangkan pusat keilmuan dan kajian serta pemberdayaan masyarakat.

4. Apa yang Dilakukan?

Organisasi keagamaan mempunyai korelasi yang erat dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dimana institusi sebagai suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau secara formal sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia (Horton dan Hunt, 1998 dalam Setianto, 2000).

Majelis Pengajian Ahad Pagi dengan frekuensi kegiatan 4 (empat) kali sebulan, selain sebagai media dakwah, juga dimaksudkan sebagai wadah silaturahmi yang memfasilitasi pengumpulan dana melalui donator tetap anggota Majelis Pengajian Ahad Pagi yang bersifat sukarela dikelola oleh Lembaga Amal, Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Lazis) bentukan Pokmas MPAP dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dana dari donator tetap
Proses pengumpulan dana dilakukan setiap acara pengajian dilaksanakan, pertama-tama dengan menjelaskan maksud, tujuan dan sasaran penggunaan dana, termasuk jumlah anggota Pokmas Perempuan “Penjual Mlijo” yang diberi dana bergulir (*revolving fund*). Selanjutnya, sumbangan dalam bentuk dana yang diberikan oleh donator tetap warga pengajian dikumpulkan oleh Seksi Pengembangan Ekonomi Umat-MPAP.
- b. Memberdayakan Pokmas Perempuan “Mlijo”
Penjual sayur keliling perempuan atau yang disebut “Mlijo” merupakan para penjual perempuan yang biasanya menjajakan sayur mayur di sekitar lingkungan masyarakat yang hidup di perkampungan dan masyarakat umum.

Penjual mlijo ini sebenarnya telah lama berinteraksi dalam memasarkan dagangannya. Mereka umumnya merupakan satu rumpun keluarga atau memiliki rumah yang saling berdekatan satu sama lain. Dengan mengutip Coleman, Fukuyama menyebutkan, bahwa modal sosial menunjuk pada seperangkat sumber daya yang melekat dalam hubungan keluarga dan dalam organisasi sosial komunitas. Kerjasama dalam keluarga itu dimungkinkan karena adanya faktor biologis yang kodrati dan itu tidak hanya mempermudah dan mempermudah jenis-jenis aktivitas sosial lainnya. Sehingga kedekatan dan tingkat komunikasi mereka sangat mudah untuk dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas mereka sehari-hari, antara lain: saat mereka mengambil dagangan (*kulakan*) berupa sayur mayur dari produsen atau pasar pengepul dan saat mereka memasarkan dagangannya secara berkeliling selalu dilakukan bersama-sama dengan wilayah yang telah ditentukan sendiri sesuai kesempatan mereka bersama.

Kelompok penjual mlijo perempuan merupakan kelompok masyarakat yang karena alasan tertentu termasuk kelompok masyarakat yang kurang mampu, hal ini ditandai dengan tingkat pendidikan maupun standar hidup mereka yang masih rendah, yaitu adanya kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Levitan dalam Suyanto, 1992 dalam Sunatiningsih, 2004). Hal ini mendorong Pokmas Perempuan MPAP untuk membantu kelancaran aktivitas mereka dalam upaya mempercepat upaya mendorong keberdayaan dan kemandirian untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Upaya Pokmas Perempuan MPAP melakukan upaya: *Pertama*, Setiap anggota pengajian yang memiliki kulkas secara sukarela menyisakan tempat dengan inisiatif sendiri maupun kelompok bersedia dititipi sayur mayur yang tidak laku pada hari itu untuk disimpan di kulkas agar dapat dijual kembali esok harinya oleh penjual mlajo pemiliknya. *Kedua*, dana yang sudah terkumpul dari para donator tetap MPAP, disalurkan kepada para penjual mlajo yang sudah terbentuk pokmasnya berupa dana bergulir (*revolving fund*) untuk menambah modal mereka.

Di wilayah kelurahan Cemorokandang - Kota Malang, dari jumlah yang ada difasilitasi oleh Pengurus MPAP mereka dikelompokkan ke dalam 6 (enam) kelompok dimana masing-masing kelompok terdiri dari @ 15 (lima Belas) orang dengan 1 (satu) orang ketua dan 14 (empat belas) orang anggota. Ketua kelompok bertanggungjawab terhadap peredaran dana sekaligus penarikan dana setiap bulannya. Upaya pengelompokan ini dilakukan untuk lebih mudah memberikan binaan, arahan serta pengaturan pemberian dana selain sebagai alat control kegiatan mereka.

Mula-mula, dana bergulir yang diberikan pada setiap kelompok sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap anggota. Dengan perhitungan setiap bulan mereka akan mengembalikan ke Pengurus MPAP melalui Seksi Pengembangan Umat sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), melalui ketua kelompok masing-masing dengan jangka waktu 15 (lima belas) bulan. Artinya mereka hanya mengembalikan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) setiap harinya dan tanpa dibebani bunga ataupun jasa lainnya.

Hasil pengembalian dana bergulir dari setiap penjual mlajo perempuan setiap bulannya adalah Rp. 30.000,- X 15 orang sehingga uang yang terkumpul berjumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Hal ini berarti bahwa setiap bulan, Seksi Pengembangan Ekonomi Umat MPAP dapat menggulirkan dana tersebut untuk satu orang anggota baru dalam kelompok penjual mlajo perempuan.

Dengan penambahan modal tersebut, ternyata mereka dapat menyisihkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini dengan asumsi saat mereka menjajakan dagangan yang rata-rata dengan modal pembelian dagangan Rp. 250.000 per hari mereka dapat menjual dagangan habis dagangan laku Rp. 350.000,- perhari, dengan keuntungan Rp. 75.000,- perhari dengan rata-rata menjajaan pada 20 pelanggan. Namun setelah mereka mendapat tambahan Rp. 450.000,- per orang, mereka memiliki modal Rp. 700.000 dengan penjualan dagangan habis per hari Rp. 1.000.000,- artinya mereka bisa menyisihkan keuntungan kotor sebesar Rp. 300.000,-. Keuntungan bersih mereka setelah dibayarkan penyusutan sepeda motor Rp. 25.000, perhari, bensin Rp. 15.000,- perhari, ongkos kerja Rp. 25.000,- perhari dan cicilan Rp. 1.000 perhari dengan total pengeluaran Rp. 66.000,- perhari maka keuntungan bersih yang mereka dapat peroleh Rp. 239.000,- perhari. Dengan bertambahnya modal bukan berarti berhenti sampai di situ dengan sendirinya mereka tetap membuka penjualan di rumah setelah mereka berjualan keliling untuk menghabiskan dagangan yang kemungkinan masih sisa. Upaya lainnya adalah dengan menitipkan dagangan ke warung lain dan mengolah dagangan sisa menjadi makanan matang untuk dijual hari berikutnya.

Namun resiko kegagalan yang mungkin terjadi dari modal yang telah diterima sebesar Rp. 450.000,- bukan tidak mungkin karena sesuatu hal sangat sulit untuk dikembalikan secara tetap berdasarkan angsuran yang ditetapkan. Maka kelompok yang juga penanggung renteng akan melakukan negosiasi dengan pokmas perempuan keagamaan sebagai pemberi modal untuk memecahkan masalahnya di mana jaringan (*network*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan social (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi social (koordinasi dan koperasi) untuk kepentingan bersama. Pierre Bourdieu (1970) berpendapat bahwa modal social mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapat seseorang didalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas social tertentu. Selanjutnya James Coleman mengatakan bahwa modal social adalah sumberdaya yang lahir dari kumpulan suatu ikatan social tertentu. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa berbeda dengan asset financial yang diperoleh dari kredit, asset sumberdaya manusia yang dapat diperoleh dari intelektualitasnya maka modal social dapat diperoleh dari relasi antar manusia. Di mana teori perilaku social melihat antara perilaku dengan lingkungan terdapat

lingkungan yang saling mempengaruhi (John Tibaut dan Harlod Kelley, 1959; George Homans, 1961; Ricard Emerson, 1962 dan Peter Blau, 1964). Modal social ini juga yang melahirkan “kontrak social” dan norma yang berlaku bagi seluruh masyarakat (Ahmad, 2001).

5. Manfaat bagi Perempuan Penjual “Mlijo”

- a. Perempuan “Mlijo” dapat meningkatkan ikatan social secara lebih intens dengan adanya kesamaan tujuan dan cara pandang yang dibangun bersama.
- b. Perempuan “Mlijo” terbiasa untuk membicarakan bersama-sama apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan mereka.
- c. Perempuan “Mlijo” mengalami bagaimana menyusun aturan main bersama.
- d. Perempuan “Mlijo” memiliki wadah mengidentifikasi kepentingan dan kebutuhan riil mereka secara bersama-sama.
- e. Perempuan “Mlijo” mengalami dan mengerti mekanisme pengambilan keputusan secara kolektif yang didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan bersama.
- f. Perempuan “Mlijo” mengalami pembelajaran dalam meresolusi konflik yang bisa jadi menyertai proses dan hasil pengambilan keputusan.
- g. Perempuan “Mlijo” merasakan manfaat keberadaan suatu jaringan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan bersama.
- h. Perempuan “Mlijo” merasakan manfaat bagi keberadaan “Majelis Pengajian Ahad Pagi” sebagai pokmas perempuan keagamaan yang mampu memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan mereka.

PENUTUP

Masyarakat miskin dengan keterbatasan dan ketidakberdayaan mereka, berpotensi menyerah terhadap kondisi kehidupan dan semakin jauh dari suatu harapan sebagai suatu masyarakat sejahtera. Pada umumnya mereka kesulitan meningkatkan taraf hidup. Kelompok masyarakat yang dibentuk oleh Pemerintah karena program-program pembangunan ataupun yang tumbuh karena kepentingan tertentu dibidang ekonomi lebih mempermudah digunakan untuk bersama-sama meningkatkan dan mempercepat kemandirian perempuan dalam usaha di sektor ekonomi mikro kecil.

Kelompok masyarakat perempuan menjadi sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perempuan dengan memberi akses modal dalam peningkatan usaha ekonomi produktif mereka agar lebih mandiri dan memiliki keberdayaan dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya melalui pokmas-pokmas yang ada..

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, M.C. 2002.”**Wajah Murung Ketenagakerjaan Kita**”, Kompas, 25 November
- Brata, Aloysius Gunadi. 2001. **Agar Desentralisasi Bermakna Bagi Modal Sosial**. Artikel dalam www.saturnet.com
- Coleman, J.S. 1988. **Social Capital in the Creation Of Human Capital**’ *American Journal of Sociology* **94 (Supplement)**: S95-S120.
- Esman, Milton J. dan Norman T. Uphoff, **Local Organisations: Intermediaries in Rural Development**, 1988. Cornell University Press, Ithaca and London.
- Karsidi, Ravik. 1997. **Persiapan Sosial**, *Makalah Pelatihan Pendampingan Pengusaha Usaha Mikro*, Malang: Bank Indonesia.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. **Otonomi dan Pembangunan Daerah. Reformasi. Perencanaan, Strategi, dan Peluang**. Erlangga, Jakarta.

- Linz, Juan J dan Alfred Stepan, 1996. **Problems of Demokrtatic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe**, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.
- Mubyarto. 1991. Strategi **Pembangunan Pedesaaan**, Yogyakarta: P3PK UGM.
- Rahardjo, Murwatie B. dan Sukardi Rinakit, **Pemberdayaan Petani dalam Buku Pemberdayaannya, Konsep, Kebijakan dan Implementasinya**. Center For Strategic and International Studies. Jakarta. 1996
- Raharjo, M. Dawam. 1989. **Metode Pelibatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pedesaaan**. makalah *Diskusi Periodik di PSPP Lemlit UNS*. Surakarta 21 Oktober 1989.
- Rappaport J. 1985. **“The Power of Empowerment Language, Journal of Social Policy”**, 16.
- Rondinelli, Denis A. 1990. **Proyek Pembangunan Sebagai Manajemen Terpadu**. Bumi Aksara. Jakarta.
- Tokrowinoto, Moeljarto. 1996. **Pembangunan, Dilema dn Tantangan**. Pustaka Pelajar. Yoyyakarta.
- Ruwiyanto, Wahyudi. 1988. **Pengaruh factor-faktor Dinamika Organisasi Lembaga Pendidikan Karya Terhadap Manfaat Sosio Ekonomi Warga Belajar**. Disertasi S3. Bogor: Fak. Pasca Sarjana IPB.
- Setianto. Imam. 2000. Analisis Fungsi-fungsi Manajemen Lembaga Lokal di Desa Cemorokandang, Kecamatan Kedung Kandang Dat II Malang.
- Sunatiningsih, Agnes. 2004. **Pemberdayaan Masyarakat Desa: Melalui Institusi Lokal**. Gajahmada. Yagyakarta.
- Suryahadi, A.W. Widyanti, D. Perwira, S. Sumarto. **“ Minimum Wage Policy and Its Impact on Employment in the Urban Formal Sector”**, *Bulletin of Indonesian Economic Studies Vol 39* No 1, 29 – 50.
- Swift C. dan G. Levin, **“Empowerment: An Emerging Mental Health Technology”**, Journal of Primary Prevention, 7.
- Tonkiss, F. 2000. **“Does Social Capital and Economy,”** Dalam F. Tonkiss dan A. Pasey (eds.) *Trust and Civil Society*. New York:St. Martin’s